LIIZ DDIZNI DEDANI INIDONIECIA

Poin total 95/100 ?	
NAMA	
KELAS	
◯ XI RPL 6	
XI RPL 7	
XI RPL 8	
NO ABSEN	

!

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia mempunyai landasan ideal, yaitu 5/5 Pancasila terutama sila
Ketuhanan Yang Maha Esa sampai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Persatuan Indonesia
Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Kemanusiaan yang adil dan beradab
Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas berarti
Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas berarti Bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas masalah-masalah internasional dan terlepas dari kekuatan raksasa dunia
Bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas masalah-masalah internasional dan terlepas dari kekuatan raksasa
Bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas masalah-masalah internasional dan terlepas dari kekuatan raksasa dunia
Bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas masalah-masalah internasional dan terlepas dari kekuatan raksasa dunia Bebas bekerja sama dengan negara adidaya

Kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain disebut sebagai	5/5
O Politik Apartheid	
O Politik Pintu Terbuka	
Politik Luar Negeri	
Hubungan Luar Negeri	
Faktor internal kerjasama antar negara yaitu	10/10
Khawatir terancam kelangsungan hidup sebuah negara	
Negara Indonesia bisa Berdiri di kaki sendiri	
keinginan untuk membutuhkan bantuan negara lain	
Memiliki keunggulan bidang ekonomi	
Memiliki keunggulan bidang militer	

(Praktik mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah asing atau organisasi antar pemerintah melalui dialog, negosiasi dan cara non-kekerasan lainnya disebut	*5/5
	Lobby	
(Diplomasi	
(Propaganda	
(Diplomat	
(Negosiasi	
	Indonesia aktif dalam kegiatan organisasi internasional berikut kecuali,	5/5
	Indonesia aktif dalam kegiatan organisasi internasional berikut kecuali, ASEAN	5/5
		5/5
	ASEAN	5/5
	ASEAN Gerakan Non Blok	5/5
	ASEAN Gerakan Non Blok NATO	5/5

Hubungan antar bangsa, baik regional maupun internasional melalui kerjasama 5/5 bilateral ataupun multilateral yang ditujukan untuk kepentingan nasional disebut
O Politik Luar Negeri
O Politik Bebas Aktif
Hubungan Luar Negeri
Organisasi Internasional
O Politik Pintu Terbuka
Wadah untuk melaksanakan kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu 5/5 tujuan bersama yang disepakati disebut sebagai
, i i
tujuan bersama yang disepakati disebut sebagai
tujuan bersama yang disepakati disebut sebagai Organisasi Internasional
tujuan bersama yang disepakati disebut sebagai Organisasi Internasional Hubungan Internasional

Politik luar negeri bebas aktif yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu	5/5
ikut mencerdaskan kehidupan bangsa	
ikut melaksanakan ketertiban dunia	
memajukan kesejahteraan umum	
melindungi segenap bangsa Indonesia	
melindungi tanah air Indonesia	
Politik luar negeri RI merupakan implementasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila terutama sila	5/5
	5/5
Pancasila terutama sila	5/5
Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa	5/5
Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab	5/5
Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyaatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam	5/5

Bentuk protes paling keras ketika terjadi konflik antarnegara ditunjukkan dengan 5/5
pemutusan hubungan diplomatik
pengiriman surat protes kepala negara pemanggilan pulang duta besar negaranya sendiri
pemanggilan duta besar negara yang diprotesnya
penyerahan surat-surat kepercayaan negara tempat bertugas
Tokoh utama yang mengetengahkan istilah politik luar negeri bebas aktif dalam 5/5 sidang-sidang BPUPKI adalah
sidang-sidang BPUPKI adalah
sidang-sidang BPUPKI adalah Drs. Mohammad Hatta
sidang-sidang BPUPKI adalah Drs. Mohammad Hatta Mr. Roeslan Abdul Ghani
sidang-sidang BPUPKI adalah Drs. Mohammad Hatta Mr. Roeslan Abdul Ghani Ir. Soekarno

Prinsip dasar dalam hubungan internasional bagi Indonesia dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah	5/5
Monoloyalitas pada negara maju dan modern	
Mengutamakan kepentingan nasional semata	
Saling menghormati sesama negara bekas jajahan	
Hidup berdampingan secara damai walaupun dengan penjajahan	
Mengutamakan cara penyelesaian masalah secara damai	
Berikut yang termasuk kerja sama bilateral adalah	5/5
Berikut yang termasuk kerja sama bilateral adalah perjanjian batas wilayah laut antara RI dengan India dan Pakistan	5/5
	5/5
perjanjian batas wilayah laut antara RI dengan India dan Pakistan	5/5
perjanjian batas wilayah laut antara RI dengan India dan Pakistan perjanjian pencegahan terorisme internasional sedunia	5/5
 perjanjian batas wilayah laut antara RI dengan India dan Pakistan perjanjian pencegahan terorisme internasional sedunia perjanjian kerja sama militer negara Atlantik Utara 	5/5

Indonesia pernah menyatakan diri keluar dari keanggotaan PBB pada tahun	5/5
O 1959	
O 1963	
O 1964	
1965	
O 1960	
Dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1959 yang diselenggarakan di Bandung menghasilkan deklarasi dengan semangat	0/5
memperkuat solidaritas bangsa-bangsa Asia Tenggara	
memupuk kerja sama militer negara Asia Afrika	
mendukung perjuangan rakyat Palestina	
meningkatkan solidaritas bangsa-bangsa di Asia Afrika	
mengkritisi organisasi dunia PBB yang ada hak vetonya	

Menteri luar negeri pertama dalam kabinet yang ditetapkan PPKI pada tanggal 5/5 18 Agustus 1945 adalah	
Mr. Ahmad Soebarjo	
Mr. A. A Maramis	
Prof Dr. Mr. Soepomo	
R.A.A Wiranata Kusumah	
KH. Agus Salim	
	_
Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yang diabadikan demi	
Indonesia adalah bebas aktif yang diabadikan demi	
Indonesia adalah bebas aktif yang diabadikan demi kepentingan nasional	
Indonesia adalah bebas aktif yang diabadikan demi kepentingan nasional kepentingan regional	

Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999, Politik luar negeri dilaksanakan 5/melalui diplomasi yang	5
 kreatif, aktif, dan antisipasif agresif dan waspada terhadap mitra berunding teguh dalam pendirian dan antiberkorban rasional dan selalu kerja keras untuk menang luwes dalam berdebat dengan tipu muslihat 	
Berikut adalah alasan Indonesia menolak bergabung dengan negara adikuasa 5/ setelah Perang Dunia II, kecuali	5
setelah Perang Dunia II, kecuali terseret ke dalam paham ideologi tertentu	5
setelah Perang Dunia II, kecuali	5

Dokumen penting yang berisi pernyataan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah laut dan daratan dari Sabang sampai Merauke dan dibatasi oleh titik-titik terluar Indonesia sehingga tidak ada kantong wilayah asing di dalam gugusan pulau Nusantara adalah	5/5
Proklamasi 17 Agustus 1945	
Pembukaan UUD 1945	
Zona Ekonomi Eksklusif	
Deklarasi Juanda	
Dekrit Presiden 5 Juli 1959	
Indonesia aktif dalam kegiatan organisasi Internasional berikut ini, kecuali	
ASEAN	
O ASEAN O Gerakan Non Blok	
Gerakan Non Blok	
Gerakan Non Blok PBB	

Formulir ini dibuat dalam SMK Telkom Malang.

Google Formulir